BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Suandy, 2011). Dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa “pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah” (Simarmata, 2014). Dari ketiga pendapatan negara tersebut, sekitar 70% merupakan pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan.

Besarnya perananan sektor perpajakan dalam suatu negara membuat pemerintah selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan, serta menaikkan target penerimaan sektor perpajakan dari tahun ke tahun sebagai upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan di dalam negeri (Simarmata, 2014).

Pada dasarnya pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak, baik perorangan maupun badan atau perusahaan. Namun bagi perusahaan pajak adalah biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Dimana jika semakin tinggi laba perusahaan maka akan

semakin besar pula pajak yang dibayarkan, karena pajak dihitung dari persentase laba yang diperoleh perusahaan. Dengan demikian hal inilah yang menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak akan cenderung melakukan perencanaan pajak atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan. Hal ini dilakukan perusahaan agar dapat meningkatkan laba setelah pajaknya.

Perencanaan pajak (*tax planning*) itu sendiri menurut Suandy (2011) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak agar dapat mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Perencanaan pajak pada dasarnya bisa dilakukan dengan dua cara yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan pelanggaran pajak (*tax evasion*). Namun perencanaan pajak dalam penelitian ini berorientasi pada aktifitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya, memiliki tujuan utama yakni meningkatkan nilai perusahaan dan memakmurkan para pemegang sahamnya. Kenaikan nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan berupaya untuk bekerja lebih keras dengan menggunakan berbagai

intensif untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara mendorong manajer (Simamarta, 2014). Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Jika semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham (Sari, 2010).

Dengan demikian salah satu aktivitas perusahaan dalam memaksimal nilai perusahaan yakni dengan melakukan perencanaan pajak. Pada dasarnya pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan mempunyai dua prespektif yaitu positif dan negatif. Perencanaan pajak akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan jika dilihat dari prespektif tradisional dimana dengan mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan kepada negara akan meningkatkan nilai perusahaan. Prespektif kedua, perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, jika dilihat dari prespektif *agency theory*, dimana perencanaan pajak memberikan peluang bagi manajerial untuk melakukan tindakan oportunistik (mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan *shareholders*) sehingga menurunkan nilai perusahaan (Desai *et.al.* 2006).

Tindakan *oportunistik* ini akan mengakibatkan dua kemungkinan yaitu melaporkan laba komersil lebih rendah (*understatement*) dan mengambil insentif dari penurunan pembayaran kewajiban pajak yang diakibatkan dari pelaporan laba komersil yang lebih rendah tersebut. Jika dua kemungkinan ini terjadi, maka aktivitas tersebut bersifat

complementary (saling melengkapi satu aktivitas dengan aktivitas lainnya) sehingga hal ini menyebabkan adanya kurang transparan manajerial dalam hal perencanaan pajak atau aktivitas perencanaan pajak tersebut tidak terdeteksi oleh *shareholders* dengan melaporkan laba komersil yang lebih rendah (Lestari, Wardhani dan Anggraita, 2013).

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak dapat mempengaruhi nilai perusahaan, peneliti menggunakan indikator *Effective Tax Rate* sebagai alat ukur dari perencanaan pajak. Sementara untuk ukuran nilai perusahaan peneliti menggunakan *Tobins Q* sebagai indikatornya. *Effective Tax Rate* merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah beban pajak dengan laba sebelum pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana *Effective tax rate* (ETR) merupakan sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Rachmithasari, 2015). Sedangkan *Tobins Q* menurut Herawati (2008) adalah perbandingan antara *market value of equity* ditambah *debt* dengan *book market value* ditambah dengan hutang (*debt*). Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin (1967) dan dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan *crossectional* dalam pengambilan keputusan investasi (Simarmata, 2014).

Berikut adalah data sementara yang menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan, menggunakan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 yang diperoleh peneliti dari situs resmi BEI:

Tabel 1: Rata-Rata *Effective Tax Rate* dan *Tobins Q* Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014

Tahun	ETR	Tobins Q
2012	-0.13	2712067.41
2013	-0.08	2697326.58
2014	-0.22	2108464.77

Sumber: www.idx.co.id, yang diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata perencanaan pajak yang diukur dengan ETR mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Sementara jika melihat nilai perusahaan yang diukur dengan *Tobins Q* justru mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengartikan bahwa tinggi rendahnya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, membuat nilai perusahaan mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika mengacu pada perspektif yang telah dijelaskan di atas, terdapat adanya ketidaksesuaian teori dengan data penelitian. Terutama pada tahun 2014, dimana perencanaan pajak mengalami penurunan namun *Tobins Q* juga mengalami penurunan.

Beberapa studi menemukan hubungan langsung antara ukuran nilai perusahaan dan perencanaan pajak. Secara khusus Desai *et al.*, dalam Winanto dan Widayat (2013) memprediksi bahwa pengaturan perencanaan pajak dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan ketika manajer memiliki kesempatan untuk mengecilkan laporan laba

akuntansi dan insentif untuk mengurangi kewajiban pajak penghasilan badan dengan mengecilkan penghasilan kena pajak. Hal ini karena manajer menutupi perencanaan pajak yang dilakukannya kepada pemegang saham (Winanto dan Widayat, 2013).

Beberapa penelitian yang juga menemukan adanya pengaruh antara perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap nilai perusahaan diantaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk, (2013) yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Moderasi *Corporate Governance*. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan nilai perusahaan. Dalam artian bahwa dengan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak akan semakin meningkatkan nilai perusahaan. Lebih lanjut Lestari, dkk, (2013) menyatakan bahwa hasil ini mendukung perspektif teori tradisional yang menyatakan bahwa aktivitas perencanaan pajak untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham, dimana perencanaan pajak merupakan aktivitas yang dapat menurunkan biaya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Selain itu, penelitian Ilmiani dan Sutrisno (2014) yang berjudul Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel *Moderating*, menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa semakin tinggi penghindaran pajak

maka semakin rendah nilai perusahaan. Lebih lanjut Ilmiani dan Sutrisno (2014) menjelaskan dalam hasil penelitiannya tersebut telah membuktikan bahwa pasar bereaksi negatif. Tindakan manajemen untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak berdasarkan monitoring dari institusi akan dapat meningkatkan nilai perusahaan, akan tetapi laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyesatkan investor karena tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Berdasarkan pada asumsi dan beberapa penelitian di atas maka peneliti bermaksud ingin menguji kembali adanya pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Lestari, dkk, (2013). Namun yang membedakan penelitian ini dengan Lestari, dkk, (2013) adalah penelitian Lestari, dkk, (2013) menggunakan variabel moderasi yakni *Corporate Governance* sebagai variabel yang mempengaruhi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan, namun penelitian ini tidak menggunakan hal tersebut dengan asumsi peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan tanpa ada pengaruh dari variabel lain.

Selain itu, objek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian Lestari, dkk, (2013) menggunakan perusahaan non perbankan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun penelitian juga merupakan faktor pembeda antara penelitian ini dengan penelitian

Lestari, dkk, (2013), dimana penelitian ini dilakukan dari tahun 2012 hingga 2014 yakni selama 3 tahun, sementara penelitian Lestari, dkk, (2013) hanya menggunakan 2 tahun penelitian yakni tahun 2010 sampai 2011.

Adapun alasan peneliti menggunakan perusahaan sektor barang konsumsi sebagai objek penelitian ini karena perusahaan sektor barang konsumsi merupakan perusahaan yang bergerak dalam perdagangan produk-produk yang bersifat konsumtif seperti halnya makanan dan minuman serta obat-obatan. Dimana kebutuhan masyarakat akan produk-produk ini membuat perusahaan ini memiliki laju pertumbuhan yang pesat.

Sebagaimana dilansir pada situs neraca harian ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan daya beli masyarakat yang cukup baik membuat konsumsi makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan tajam. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) memprediksi pertumbuhan industri mamin pada kuartal ke 3 tahun 2012 akan mencapai 8,2%, tetapi kenyataannya pertumbuhan industri mamin telah mencapai 12,75% (www.neraca.co.id). Selain itu, perusahaan farmasi juga memiliki potensi pasar yang besar. Mengingat bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia maka kebutuhan masyarakat terhadap suplemen dan obat-obatan juga akan semakin besar. Hal ini akan memicu tingkat penjualan yang juga semakin besar.

Penjualan pada sektor barang konsumsi yang besar ini, membuat perusahaan dapat memperoleh laba yang besar pula. Dengan demikian beban pajak yang ditanggung pun akan lebih besar. Hal ini yang kemudian menjadikan perusahaan berpotensi melakukan perencanaan pajak dengan tujuan agar dapat meminimalisasi pembayaran pajak yang terlalu besar, yang kemudian membuat perencanaan pajak ini dapat berpotensi pada dua persepektif yakni perspektif positif dan perspektif negatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai ETR perusahaan sektor barang konsumsi mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
2. Tobins Q perusahaan sektor barang konsumsi mengalami penurunan setiap tahunnya
3. Perencanaan pajak perusahaan sektor barang konsumsi memicu penurunan dan peningkatan angka nilai perusahaan

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *tax planning* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang *Tax Planning* dan Nilai Perusahaan, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi dan juga referensi yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dalam berinvestasi dengan melihat kondisi perusahaan, juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi khususnya pada perusahaan sektor barang konsumsi di BEI.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam bidang keuangan dan faktor fundamental terutama dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan.